

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Huda, Ni'Matul, "Hukum Tata Negara Indonesia". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Librayanto, Romi, "Trias Politica dalam struktur ketatanegaraan Indonesia". Makassar: PuKAP-Indonesia, 2008

Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-Undangan". Jakarta: Kanisius, 2013

Soimin dan Sulardi, "Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004

M. Yahya Harahap, "Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata". Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih". Jakarta : 2011.

Arianto, Henry. "Metode Penelitian Hukum". Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta : 2006

Nurdin, Boy. Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung : PT Alumni, 2012.

Nuh, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.

Soekanto, Soerjono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 2007.

Isra, Saldi. "Menyoal Konstitusionalitas Pemilihan Calon Hakim Agung Oleh DPR" makalah dalam acara diskusi publik di Universitas Sahid. Jakarta : 2013

Syahuri, Taufiqurrohman."Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial Republik Indonesia". Universitas Sahid. Jakarta : 2010

Naskah komperhensi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : latar belakang proses dan hasil pembahsan, buku IV Tentang Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia.*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia.*Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2004Tentang Komisi Yudisial*

Indonesia.*Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung*

Indonesia.*Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 20. Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*

LN tahun 2009 nomor 123, TLN nomor 5043

Indonesia.*Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2011. Tentang Komisi Yudisial*

Indonesia. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,*

DPR RI, DPD, DPRD.

Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006 Tentang Tata Tertib DPR RI

C. INTERNET

[http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-kewenangan-dpr-pilih-hakim-agung-harus dievaluasi.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-kewenangan-dpr-pilih-hakim-agung-harus-dievaluasi.html) diunduh pada tanggal 13 februari 2013

[http://kamusbahasaindonesia.org/hakim.](http://kamusbahasaindonesia.org/hakim)